

PENUTUPAN LOKALISASI DOROKANDANG: ANTARA PERTIMBANGAN MORAL, SOSIAL DAN KEBUTUHAN EKONOMI

Ikayanti

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
Email: ikayantiunnes@gmail.com

Puji Lestari

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dari penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Faktor-faktor yang dominan terhadap penutupan lokalisasi di Desa Dorokandang penting untuk diketahui mengingat bahwa selama ini keberadaan lokalisasi di tengah masyarakat selalu menuai berbagai pro dan kontra. Keputusan penutupan lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dorokandang dalam rangka untuk menangani permasalahan sosial berupa praktik pelacuran atau prostitusi di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang penutupan lokalisasi di Desa Dorokandang berdasarkan beberapa faktor diantaranya faktor pertimbangan moral, sosial dan ekonomi. Harapan dari pemerintah Desa Dorokandang dengan adanya penutupan lokalisasi tersebut adalah adanya kerjasama baik dari masyarakat desa setempat, pemerintah Kabupaten Rembang serta Satpol PP dalam pengawasan di wilayah eks lokalisasi agar tidak terjadi praktik prostitusi di kawasan tersebut secara sembunyi-sembunyi.

Kata Kunci: Penutupan Lokalisasi, Faktor Sosial dan Ekonomi, Pemerintah Desa Dorokandang

Abstract

This study aims to determine the background of the closure of localization in the area of Dorokandang Village, Lasem District, Rembang Regency. The dominant factors towards the closure of localization in Dorokandang Village are important to note given that so far the existence of localization in the middle of the community always reaped various pros and cons. The decision to close the localization was carried out by the Dorokandang Village government in order to deal with social problems in the form of prostitution or prostitution in the region. The research method used is a qualitative research method. The results of the study show that the background of the closure of localization in Dorokandang Village is based on several factors including moral, social and economic considerations. The hope of the Dorokandang village government with the closure of the localization was the cooperation of both the local village community, the Rembang Regency government and the Satpol PP in the supervision of the ex-localization area so that the practice of prostitution in the area would not occur in secret.

Keywords: Closing Localization, Social and Economic Factors, Dorokandang Village Government

Pendahuluan

Pelacuran atau prostitusi menjadi salah satu penyakit dalam masyarakat yang tua usianya (Yayan, 2015:2). Praktik pelacuran atau prostitusi menjadi salah satu fenomena penyakit sosial yang menuai berbagai pro dan kontra dalam masyarakat. Dari berbagai faktor yang melatarbelakangi, keadaan ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik pelacuran atau prostitusi masih berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Praktik pelacuran atau prostitusi tumbuh dan berkembang di Indonesia, bahkan tidak ada daerah di Indonesia yang tidak mengenal praktik pelacuran atau prostitusi (Zulfiqar,dkk, 2014:1199).

Menurut Kartono (2009:177) pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan segala usaha yang dilakukan. Salah satu bentuk upaya dalam meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan dari adanya praktik pelacuran atau prostitusi adalah dengan cara melegalkan lokalisasi. Lokalisasi secara umum dipahami sebagai pembatasan pada suatu tempat atau lingkungan. Menurut Daldjoeni (dalam Pratama:125), lokalisasi dimaknai sebagai pemusatan suatu kegiatan pada wilayah terbatas. Sedangkan menurut Kartono (2015:254), lokalisasi itu pada umumnya terdiri atas rumah-rumah kecil yang berlampu merah, yang dikelola oleh mucikari atau germo. Lokalisasi adalah pemusatan kegiatan pada wilayah yang terbatas dimana terjadi pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah

sebagai transaksi perdagangan (Pratama:125). Menurut penulis simpulan dari pengertian lokalisasi adalah pemusatan kegiatan pelacuran atau prostitusi dalam satu wilayah agar dapat mudah dipantau sehingga mengurangi dampak yang ditimbulkan seperti halnya penyebaran penyakit kelamin. Lokalisasi menjadi salah usaha untuk mengurangi dampak buruk dari aktivitas pelacuran atau prostitusi. Menurut Maskawi dan Matali (dalam Yayan, 2015:3) keberadaan lokalisasi telah memunculkan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat diantaranya, pedagang, tukang becak, tukang ojek, pembantu atau tukang cuci pakaian, tukang pijat, dan penjual jamu. Secara tidak langsung keberadaan kawasan lokalisasi telah memberikan dampak positif bagi sebagian pihak yang memanfaatkan sebagai tempat usaha. Terlepas dari dampak positif bagi perekonomian, sebagian masyarakat lebih memandang lokalisasi bermakna negatif dan memberikan pengaruh buruk bagi perkembangan moral anak-anak di sekitar kawasan lokalisasi. Pada kenyataannya keberadaan lokalisasi di tengah masyarakat masih menimbulkan beberapa pro dan kontra. Desakan untuk menutup selalu menjadi salah satu alasan utama masyarakat terhadap keberadaan lokalisasi itu sendiri. Desakan masyarakat, alim ulama dan tokoh masyarakat kerap mengalahkan dukungan keberadaan lokalisasi itu sendiri (Zulfiqar, dkk, 2014:1203). Data terbaru Kementerian Sosial (Kemensos) sampai dengan tahun 2017, Kemensos berhasil mendukung penutupan lokalisasi dengan

merehabilitasi dan memulangkan 20.000 lebih penghuni lokalisasi tersebut. Dari jumlah 168 , yang sudah ditutup berjumlah 118 lokalisasi dan saat ini tersisa 41 lokalisasi yang belum ditutup. Penutupan lokalisasi dengan *support* anggaran dari Kementerian Sosial berjumlah 66 lokalisasi sedangkan dukungan dari APBD berjumlah 52 lokalisasi. Penutupan lokalisasi tersebut sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan program “2019 Indonesia Bebas Prostitusi”.

Terkait dengan penutupan lokalisasi dalam rangka penanganan masalah sosial, pemerintah Desa Dorokandang bersama dukungan masyarakat serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Lasem dan elemen lain pada tanggal 27 Juni 2017 secara resmi menutup lokalisasi di kawasan Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Penanganan penyakit masyarakat berupa praktik pelacuran atau prostitusi di Desa Dorokandang harapannya dijadikan pintu masuk untuk penertiban segala bentuk penyakit masyarakat di daerah lain. Penutupan lokalisasi di Desa Dorokandang merupakan salah satu upaya untuk membersihkan Kabupaten Rembang khususnya kawasan Kecamatan Lasem dari citra buruk karena adanya tempat-tempat prostitusi yang selama ini tumbuh dan berkembang di Kabupaten Rembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang berdasarkan pertimbangan moral, sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Penelitian ini berfokus pada latar belakang penutupan lokalisasi dari faktor sosial, moral dan ekonomi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu, data teks seperti transkrip, atau data gambar seperti foto) untuk analisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan (Creswell, 2015:251).

Kajian ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan di kawasan lokalisasi Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Data dikumpulkan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh data dan informasi, dilakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya Kepala Desa, salah satu perangkat Desa Dorokandang, eks mucikari serta masyarakat sekitar lokalisasi. Setelah data terkumpul dari berbagai sumber, selanjutnya dilakukan teknik analisis pengumpulan data yang bermacam-macam.

Hasil dan Temuan Analisis Latar Belakang Penutupan Lokalisasi di Wilayah Desa Dorokandang

Patologi sosial merupakan semua tingkah laku yang

bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal (Kartono,2017:1). Masalah-masalah sosial pada hakikatnya juga merupakan fungsi-fungsi struktural dari totalitas sistem sosial, yaitu berupa produk atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari satu sistem sosio-kultural (Kartono, 2017:4). Fenomena praktik pelacuran merupakan masalah sosial yang sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk dipertimbangkan dan diperdebatkan. Mulai dari dulu sampai sekarang masalah pelacuran merupakan masalah sosial yang sangat sensitif menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama (Oktaviari dan Handoyo, 2017:1). Salah satu upaya atau langkah untuk meminimalisir dampak dari keberadaan lokalisasi adalah dengan melegalkan lokalisasi.

Salah satu bentuk upaya dalam meminimalisasi dampak buruk dari adanya praktik pelacuran atau prostitusi adalah dengan melegalkan lokalisasi. Keberadaan lokalisasi merupakan pilihan paling realistis untuk membatasi segala ruang gerak dan penyebaran pengaruh buruk dari bisnis tersebut terhadap kehidupan masyarakat secara luas (Fatkhullah,dkk, 2013:12). Namun di sisi lain, keberadaan lokalisasi di tengah masyarakat juga menuai berbagai pro dan kontra. Begitupula dengan keberadaan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang menuai pro dan kontra bagi masyarakat. Sebagian masyarakat yang memanfaatkan

keberadaan lokalisasi sebagai tempat usaha, mendukung penuh adanya lokalisasi dengan alasan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Di sisi lain bagi sebagian masyarakat yang tidak mengambil keuntungan dari adanya lokalisasi, menolak keberadaan lokalisasi dan mendorong pemerintah Desa Dorokandang untuk menutup lokalisasi. Berangkat dari pro dan kontra dalam masyarakat, pemerintah Desa Dorokandang menutup lokalisasi dengan faktor-faktor dominan yang melatarbelakangi penutupan tersebut. Masyarakat yang pro terhadap keberadaan lokalisasi merupakan warga yang mengambil keuntungan dari kawasan lokalisasi seperti halnya sebagai tempat usaha berupa usaha kredit atau cicilan. Bagi masyarakat yang kontra terhadap keberadaan lokalisasi adalah warga yang diwakilkan oleh ibu-ibu PKK Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

1. Faktor Pertimbangan Moral

Moral adalah nilai ke-absolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Moral menjadi salah satu ukuran baik buruk dari seseorang yang ditentukan dari nilai-nilai di masyarakat. Di lihat dari aspek moral, keberadaan lokalisasi bertentangan dengan nilai-nilai moral yang ada di

masyarakat. Lokalisasi prostitusi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang tentu bertentangan dengan ajaran baik yang selama ini yang telah ada di masyarakat. Keberadaan lokalisasi prostitusi di kawasan Desa Dorokandang di tengah-tengah masyarakat telah menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang kontra terhadap keberadaan lokalisasi melihat kawasan lokalisasi prostitusi sebagai suatu hal yang yang bertentangan dengan moral dalam masyarakat. Lokalisasi prostitusi di Desa Dorokandang selain berada berdampingan dengan masyarakat juga berada di depan SMP N 1 Lasem yang secara langsung menimbulkan keresahan bagi perkembangan moral anak-anak di sekolah tersebut. Beberapa pertimbangan pemerintah desa setempat dalam memutuskan untuk menutup kawasan lokalisasi prostitusi tersebut adalah pertimbangan pada sisi moral yang tidak sesuai dengan ajaran dalam masyarakat di. Selain itu, pertimbangan pengaruh dari kawasan lokalisasi yang berdampak pada perkembangan moral anak-anak baik di lingkungan masyarakat desa maupun lingkungan sekolah yang berdekatan dengan kawasan lokalisasi tersebut.

2. Faktor Sosial

Sebagai realitas sosial dalam masyarakat, keberadaan lokalisasi selalu menuai pro dan kontra. Faktor sosial masyarakat yang melatarbelakangi terkait penutupan lokalisasi di Desa Dorokandang adalah dorongan yang kuat baik dari masyarakat dan juga keinginan dari pihak pemerintah Desa Dorokandang. Pengaruh terbesar berasal dari masyarakat yang didukung oleh MUI Kecamatan Lasem. Keluhan-keluhan masyarakat seringkali disampaikan secara langsung baik kepada Kepala Desa maupun kepada perangkat desa. Kondisi sosial masyarakat di Desa Dorokandang sebelum penutupan lokalisasi terbagi dalam 2 golongan yaitu masyarakat yang pro dan kontra terhadap kawasan lokalisasi. Masyarakat yang pro dengan adanya kawasan lokalisasi adalah mereka yang memiliki kepentingan di kawasan lokalisasi diantaranya adalah pedagang, khususnya pedagang baju kredit atau dalam istilah jawa disebut dengan *mending*. Selain itu juga bank-bank kecil yang meminjamkan uang, dengan adanya lokalisasi lebih mudah untuk membayar cicilan. Sedangkan bagi masyarakat yang kontra terhadap keberadaan lokalisasi adalah masyarakat biasa yang diwakilkan oleh

Ibu-ibu PKK, khususnya bagi masyarakat muslim.

Faktor sosial masyarakat menjadi salah satu faktor kuat yang melatarbelakangi penutupan lokalisasi. Mengingat bahwa keberadaan lokalisasi di Desa Dorokandang berada di satu kawasan dengan masyarakat biasa yaitu warga RT 12B membuat keberadaan lokalisasi selalu menuai penolakan masyarakat. Meskipun tidak sepenuhnya semua masyarakat menolak keberadaan lokalisasi di desa tersebut, namun pada kenyataannya tetap menimbulkan pro dan kontra bagi warga setempat. Pemerintah Desa Dorokandang selaku pihak yang memiliki kewenangan dengan berbagai pertimbangan serta solusi-solusi yang diberikan secara resmi menutup kawasan lokalisasi di Desa Dorokandang pada tanggal 27 Juni 2017.

3. Faktor Ekonomi

Secara umum kondisi perekonomian Desa Dorokandang di topang oleh beberapa mata pencaharian warga dengan mayoritas sebagai petani 2 musim, yaitu petani garam dan petani sawah. Kawasan lokalisasi menjadi penopang perekonomian bagi para mucikari yang berada di kawasan RT 12A. Selain sebagai penopang perekonomian bagi mucikari,

kawasan lokalisasi juga menjadi penopang perekonomian bagi sebagian warga yang memanfaatkannya. Salah satu pihak yang diuntungkan dari keberadaan lokalisasi adalah para penjual baju maupun peralatan rumah tangga secara kredit (dalam istilah jawa disebut *Mendring*) dan juga bank-bank maupun koperasi kecil yang menawarkan hutang cicilan (dalam istilah jawa disebut bank *tithil*).

Faktor ekonomi yang melatarbelakangi terkait penutupan lokalisasi diantaranya adalah keberadaan lokalisasi yang dijadikan sebagai aktivitas perekonomian bagi sebagian masyarakat Hal tersebut menjadi pertimbangan pemerintah Desa Dorokandang untuk menutup lokalisasi mengingat tujuan keberadaan lokalisasi selama ini bukan sebagai penopang perekonomian bagi masyarakat desa setempat. Pemerintah Desa Dorokandang menginginkan warga bekerja di lingkungan yang baik, pekerjaan yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Kegiatan perekonomian yang tumbuh dan berkembang di kawasan lokalisasi menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah Desa Dorokandang untuk menutup lokalisasi tersebut. Selama ini lokalisasi tidak hanya menjadi penopang perekonomian bagi

mucikari dan PSK, tetapi lebih dari itu juga menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru bagi masyarakat umum yang memanfaatkannya.

Faktor ekonomi selama ini menjadi salah satu faktor utama mengapa keberadaan lokalisasi tetap ada di lingkungan masyarakat. Minimnya keterampilan yang dimiliki oleh pelaku prostitusi mengakibatkan mereka mengambil jalan pintas untuk terjun di lingkungan praktik prostitusi. Desakan kebutuhan sehari-hari menjadikan para pelaku prostitusi tetap bertahan meskipun mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Dari faktor ekonomi inilah, pemerintah Desa Dorokandang memerhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari penutupan lokalisasi tersebut. pelatihan keterampilan serta modal usaha menjadi salah satu upaya solutif yang diberikan oleh pemerintah desa dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari penutupan lokalisasi, khususnya di bidang ekonomi. harapannya dari pihak Desa Dorokandang, para pelaku prostitusi dapat beralih pekerjaan dan benar-benar meninggalkan praktik prostitusi tersebut.

Faktor pertimbangan moral, sosial dan ekonomi telah menjadi pertimbangan yang kuat bagi pemerintah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang untuk menutup

kawasan lokalisasi tersebut. dukungan dari berbagai pihak tentu menjadi hal yang penting agar penutupan lokalisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan praktik prostitusi secara sembunyi-sembunyi.

Simpulan

Dari hasil kajian tentang faktor yang melatarbelakangi penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, dorongan yang kuat penutupan lokalisasi tersebut berasal dari baik masyarakat, MUI Kecamatan Lasem serta pihak yang tidak mengambil keuntungan dari kawasan lokalisasi. Keberadaan tempat lokalisasi di dekat pemukiman penduduk tentu menimbulkan keresahan tersendiri bagi warga setempat. Hal ini juga yang dirasakan oleh masyarakat RT 12 B Desa Dorokandang yang berada satu kawasan dengan lokalisasi. Adanya berbagai laporan dari masyarakat serta dalam rangka membersihkan Kecamatan Lasem dari penyakit-penyakit sosial, pemerintah Desa Dorokandang secara resmi menutup kawasan lokalisasi pada tanggal 27 Juni 2017. Berbagai pertimbangan pemerintah Desa Dorokandang terkait dengan penutupan lokalisasi di kawasan tersebut adalah pertimbangan, diantaranya (1) pertimbangan moral berupa pengaruh buruk dari kawasan lokalisasi terhadap perkembangan moral anak-anak yang berada di lingkungan desa maupun lingkungan sekolah yang berada berdekatan dengan kawasan lokalisasi. (2) pengaruh sosial

masyarakat berupa tuntutan masyarakat yang menginginkan penutupan lokalisasi dengan alasan penyebaran pengaruh buruk serta menimbulkan keresahan bagi keamanan lingkungan desa. (3) faktor ekonomi yang melatarbelakangi penutupan lokalisasi adalah pemanfaatan kawasan lokalisasi sebagai kegiatan perekonomian oleh sebagian warga setempat. Pada dasarnya pemerintah desa menginginkan warga Desa Dorokandang dapat bekerja dengan baik dan diterima oleh masyarakat pada umumnya. Keputusan penutupan lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dorokandang harapannya menjadi salah satu solusi dalam menangani penyakit sosial masyarakat yang ada di kawasan Kabupaten Rembang khususnya di wilayah Kecamatan Lasem.

Rekomendasi

Adapun beberapa masukan yang dapat peneliti berikan untuk pihak Kecamatan Lasem dan pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Dari pihak Kecamatan Lasem maupun pemerintah Kabupaten Rembang sebaiknya ikut serta berperan dalam menangani kendala *pasca* penutupan lokalisasi dengan mengirimkan pihak Satpol PP untuk pemeriksaan secara rutin di kawasan eks lokalisasi di Desa Dorokandang.
2. Pemerintah Kabupaten Rembang hendaknya memberikan lapangan pekerjaan bagi para eks mucikari sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan secara layak dan tidak mengalami

kesulitan dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari.

Beberapa masukan yang dapat peneliti berikan kepada pemerintah Desa Dorokandang maupun masyarakat sebagai berikut:

1. Masyarakat seharusnya ikut berperan aktif dalam memantau kawasan lokalisasi *pasca* resmi ditutup dan melaporkan kepada pemerintah Desa Dorokandang apabila masih terjadi kegiatan praktik prostitusi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat seharusnya turut aktif selain adanya pemantauan baik dari pihak desa setempat maupun dari pihak Satpol PP.
2. Pemerintah Desa Dorokandang hendaknya terus melakukan pemantauan kawasan eks lokalisasi dan melakukan pendekatan kepada para eks mucikari agar mereka tidak kembali melakukan praktek prostitusi dengan cara sembunyi-sembunyi.
3. Pemerintah Desa Dorokandang hendaknya juga memprioritaskan segala macam bentuk bantuan dari pemerintah misalnya bantuan beras maupun sembako kepada para eks mucikari agar meringankan beban perekonomian yang dialami. Keputusan penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang hendaknya bersifat solutif bagi semua pihak khususnya bagi para eks mucikari.

Daftar Pustaka

Buku

Kartono, Kartini. 2009. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Oktaviari, Nanda Suliandi dan Pambudi Handoyo. 2017. 'Jaringan Sosial Mucikari Pasca Penutupan Lokalisasi Dolly Surabaya'. Dalam *Jurnal Paradigma*. No. 02. Hal. 1.

Yayan Alex S. 2015. *Dampak Sosial Ekonomi Penutupan Lokalisasi terhadap Masyarakat Puger Tahun 2007-2014*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Zulfiqar Janif, Fitriah Nur, dan Paselle Enos. 2014. 'Analisis Kebijakan Penutupan KM 17 di Balikpapan'. Dalam *Balikpapan: E-journal Administrative Reform*. 2 (1). No. 1. Hal. 1199.

Skripsi

Pratama, Indra. *Dampak Penutupan Lokalisasi Bangunsari terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Bangunsari Krembangan, Surabaya*. Skripsi. Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.

Internet

Rehsos, OHH. 2018. *Menuju Indonesia Bebas Lokalisasi Prostituis 2019*.
<https://www.kemsos.go.id/berita/menuju-indonesia-bebas->

lokalisasi- prostitusi-
2019 (22 April 2019)
<https://id.wikipedia.org/wiki/Moral>
(22 Juni 2019).